

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia pada masa ini menjadi titik pusat perhatian organisasi baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu manusia itu sendiri sebagai unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena tanpa ketiadaan manusia organisasi tidak akan bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Kedua perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan manusia yang menjadikan kehidupan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya agar mampu mengantisipasi semua perkembangan. Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk daerahnya.

Kepemimpinan kepala desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya mencakup bagaimana kepala desa mampu mengkoordinasikan seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin kepala desa bukan hanya dituntut mengelola perangkat yang ada di dalam struktur desa. Namun juga untuk seluruh masyarakat desa.

Proses kepemimpinan dan proses pemberdayaan masyarakat desa yaitu salah satu kewenangan kepala desa dalam kaitanya dengan pembagian urusan pemerintah dalam PP No.38 tahun 2007 pasal 2 ayat 4 No. 21, yakni pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya pemerintah dalam memberdayakan

masyarakat banyak sekali. Banyaknya program-program pemberdayaan masyarakat yang di tujukan untuk membuat masyarakat lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih berdaya dengan tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat terutama masyarakat desa dari banyaknya upaya tersebut, kepala desa memegang peran penting dalam kaitanya dengan keberhasilan proses pemberdayaan. Termasuk kaitanya dalam usaha untuk menggali dan mengeksplorasi potensi yang di miliki desa untuk kesejahteraan Desa Lumbanpea.

Pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Namun pada kenyataanya fenomena di lapangan menunjukan bahwa yang terjadi di Desa Lumbanpea sumber daya manusia nya masih perlu perhatian dari pemerintah desa. Ditandai dengan masih kurangnya pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Berdasarkan dari RPJMDes Desa Lumbanpea merupakan desa yang pemudi-pemuda nya memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan permasalahan mengenai pelatihan pemberdayaan sumber daya manusia di Desa Lumbanpea.

a. Kurangnya pelatihan dan penyuluhan bagi kelompok tani

Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan pertanian dan memberikan wadah yang kokoh di pedesaan dan merupakan tempat

untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dengan kelompok tani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan keluarganya.

Masyarakat di Desa Lumbanpea pada umumnya hidup dari bertani dengan potensi kekayaan alam yang menjanjikan. Kegiatan kelompok tani dapat berkembang jika adanya dukungan dari pemerintah yang melihat potensi kelompok tani yang cukup aktif dalam menciptakan inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi desanya. Dari asset usaha tani yang dikelola, tentunya dapat memberikan mamfaat bagi anggota kelompok tani maupun bagi masyarakat.

Namum pada saat ini kondisi kelompok tani di Desa Lumbanpea dari tahun ketahun dapat dikatakan belum mengalami suatu perkembangan seperti sesuatu yang diharapkan atau hanya berjalan ditempat. Rendahnya suatu kinerja kelompok tani antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah desa yang ada. Kenyataan yang terjadi masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petani, sehingga kelompok tani tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan dari kurangnya pelatihan, pembinaan, pemingbingan dan penyuluhan untuk bagaimana cara cara yang seharusnya petani dapat lakukan dalam mengelolah pertanian yang kelompok tani miliki dengan benar.

b. Penggunaan dana desa tidak tepat sasaran

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk dana desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan jalan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk mengentaskan

kemiskinan. Penggunaan dana desa digunakan untuk pemerintahan desa sebesar 30% dan 50% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Pemanfaatan dana desa yang masih belum tepat sasaran masih saja terjadi di desa Lumbanpea dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, atau pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Toba dalam menerapkan program dana desa menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkanya, sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam musyawarah dan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa. Dengan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadinya kecurigaan antar warga dan perangkat desa.

c. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa Lumbanpea

Pemerintah desa merupakan tempat masyarakat melakukan suatu kegiatan yang menyangkut tentang data-data masyarakat dan pengurusan segala macam kegiatan yang ada dipedesaan. Sarana dan prasarana di Desa Lumbanpea sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut dikarenakan untuk kepentingan bersama baik untuk pemerintah desa maupun untuk masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Konflik sering terjadi didesa, masyarakat banyak menolak program yang dilakukan pemerintah desa kurang memadai dan tidak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, contohnya adalah jalan desa yang sudah berlubang dan tidak diperbaiki lagi oleh pemerintah desa dan dibiarkan begitu saja, dikantor desa peralatan dan perlengkapan belum memadai. Misalnya, komputer dan alat alat

lainya, selain itu pelayanan dikantor Desa Lumbanpea masih sangat berbelit-belit. Misalnya, penggunaan jasa yang membutuhkan pelayanan. Hal itu disebabkan karena faktor pendidikan dan usia, karena rendahnya pendidikan dari masing-masing perangkat desa sehingga Sumber Daya Manusia perangkat desa masih tergolong rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini sangat penting di lakukan untuk melihat sejauh mana kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun judul penelitian yaitu **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Lumbanpea Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba?
2. Bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba.
3. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dan hal-hal yang berkenaan secara teoritis dalam penelitian ini, serta input bagi desa Lumbanpea untuk meningkatkan kualitas pemimpin desa yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan tentang kepemimpinan Kepala Desa yang sesuai tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat desa, serta memberikan

kemampuan dalam hal penelitian serta teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga mampu memberikan bekal dalam penyelesaian berbagai tantangan dalam dunia kerja.

- b. Bagi universitas: penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan bacaan dengan tema kepemimpinan, daftar rujukan di Universitas HKBP NOMENSEN bagi penulis lain terkait pembahasan kepemimpinan kepala desa.
- c. Bagi Desa Lumbanpea Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba: penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan gambaran Kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, profil organisasi desa yang menarik untuk dikembangkan dengan didukung pemimpin yang kuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ialah uraian tentang teori-teori konsep yang akan di pergunakan di dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada. Dalam mengkaji dan membahas masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peranan normatif. Merton (Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefenisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan semikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007:37).

Analisis terhadap perilaku peran dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu kelenturan peran, gambaran peran dan harapan peran.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peran dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyeluruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai pembuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam pemerintah (Kencana,2001;17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Muhadam, 2007:28). Sedangkan defenisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Harbani, 2008:92).

2.1.2 Kepemimpinan

Menurut Zaccaro (2001: 453) kepemimpinan sebagai suatu keahlian dalam memberikan pengaruh pada individu atau sekelompok orang untuk memperoleh visi atau tujuan, seperti halnya pada organisasi formal dampak ini dapat menjadi bersifat formal yang diberikan oleh pimpinan yang memegang sebuah jabatan pada organisasi sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bawahannya. Seorang pemimpin dalam dilihat bagaimana pemimpin tersebut dapat mempengaruhi orang lain dengan Kharisma yang dimilikinya dan juga dapat mengendalikan semua situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya di lingkungannya. Seorang pemimpin juga harus memiliki kestabilan emosi dalam memimpin para anggota di bawahnya dan bersikap adil kepada para anggota-anggota.

Menurut McShane dan Von Glinow (2010: 360) kepemimpinan ialah memengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah keberhasilan organisasi sebagai wujud keanggotaan untuk bekerja secara antusias menuju pada pencapaian.

Kepemimpinan dipandang sebagai hubungan yang didasarkan atas pengaruh dan kekuasaan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam teori ini yaitu: a. bagaimana seorang pemimpin mempunyai kekuasaan akan menjadi efektif dan faktor-faktor situasi yang sesuai, b. sejauh mana gaya kepemimpinan seorang mempengaruhi perilaku dan kinerja bawahan. Fiedler mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil, tergantung pada penerapan gaya pemimpin terhadap tuntutan situasi.

2.1.3 Gaya kepemimpinan

Dalam kegiatan menggerakkan dan memberikan motivasi kepada bawahannya, terdapat berbagai cara yang telah dilakukan oleh seorang pemimpin yakni dengan melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut merupakan definisi gaya kepemimpinan dari para ahli diantaranya:

a. Menurut House Robbins yang dikutip oleh Donni dan Swanto (2011:158)

gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kepemimpinan direktif, kepemimpinan ini membuat bawahan tahu apa yang diinginkan oleh pemimpin dari mereka, menjadwalkan kerja untuk dilakukan dan memberikan bimbingan khusus mengenai bagaimana cara menyelesaikan tugas yang baik dan benar.
2. Kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan ini yang bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan para bawahan
3. Kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan ini berkonsultasi dengan bawahan menggunakan saran mereka sebelum mengambil keputusan.

b. Menurut Hasibuan (2011), terdapat tiga gaya kepemimpinan yaitu:

Kepemimpinan otoriter, adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau jika pemimpin tersebut menganut sistem sentralisasi wewenang.

1. Kepemimpinan partisipatif, adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan secara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan.
2. Kepemimpinan delegatif, adalah seseorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap, dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya.

2.1.4 Fungsi Kepemimpinan

Adanya kepemimpinan memiliki tujuan untuk mendapatkan mamfaat dari fungsinya,sehingga ada beberapa fungsi dari kepemimpinan untuk mencapai hal tersebut,sebagai berikut:

Menurut Wijono (2018:44), ada tiga fungsi kepemimpinan yaitu:

Pertama, fungsi-fungsi tugas (*Task Function*):

1. Mencapai sasaran dan kerja kelompok
2. Mendefinisikan tugas-tugas kelompok
3. Merencanakan kerja
4. Mengalokasikan sumber
5. Mengorganisasikan tugas dan tanggung jawab
6. Mengontrol kualitas dan mengecek kinerja
7. Meninjau kemajuan

Kedua, fungsi-fungsi Tim (*Team Function*):

1. Memelihara moral dan membangun spirit tim
2. Kohesif kelompok sebagai suatu unit kerja
3. Menentukan standard an memelihara kedisiplinan
4. Sistem komunikasi dan kelompok
5. Janji dari bawahan kepada pemimpin

Ketiga, fungsi-fungsi individual (*individual function*)

1. Mempertemukan kebutuhan individu dari antara para anggota kelompok
2. Menyelesaikan masalah pribadi
3. Menyelesaikan konflik antara kebutuhan kelompok dan kebutuhan individu
4. Melatih

2.1.5 sifat-sifat kepemimpinan

1. Energi jasmani dan mental (*physical and nervous energy*)
Hampir setiap pribadi pemimpin memiliki jasmani dan rohani yang luar biasa yaitu mempunyai daya tahan, keuletan atau tenaga yang istimewa yang tampaknya seperti tidak pernah habis.
2. Kesadaran akan tujuan dan arah (*A sure of purpose and direction*) ia memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan dia tahu persis kemana arah yang akan ditujunya serta pasti memberikan kemamfaatan bagi diri sendiri maupun bagi kelompok yang dipimpinya.
3. Antusiasme (semangat, kegairahan, kegembiraan yang besar) pekerjaan yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, memberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses, dan menimbulkan semangat serta esprit de corps.
4. Keramahan dan kecintaan (*friendliness and affection*) affection berarti kesayangan, kasih sayang, cinta, simpati yang tulus, disertai kesediaan bagi pribadi-pribadi yang disayangi.
5. Integritas
Pemimpin harus bersifat terbuka merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya bahkan merasa senasib dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama.
6. Penguasaan teknis (*technical mastery*)
Setiap pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kemahiran teknis tertentu untuk memimpin kelompoknya.

7. Ketegasan dalam mengambil keputusan

Pemimpin yang berhasil itu pasti dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas dan cepat, sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya.

8. Kecerdasan

Kecerdasan yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin itu merupakan kemampuan untuk melihat dan memahami dengan baik, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang krusial dan cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu yang singkat.

9. Keterampilan mengajar

Pemimpin yang baik itu adalah seorang guru yang mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong dan mengarahkan anak buahnya untuk berbuat sesuatu.

10. Kepercayaan

Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya selalu didukung oleh kepercayaan anak buahnya

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Hasil penelitian Tennenbaum dan Schmidt, menunjukkan kepemimpinan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Diri pemimpin
Kepribadian, pengalaman masa lalu, latar belakang, dan harapan pemimpin sangat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan disamping mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipilihnya.
2. Karakteristik atasan
Gaya kepemimpinan di manajer sangat mempengaruhi efektivitas disamping mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipilihnya.
3. Karakteristik bawahan
Tanggapan bawahan akan menentukan efektivitas kepemimpinan manajer. Latar belakang pendidikan bawahan juga sangat menentukan cara manajer menggunakan gaya kepemimpinan.
4. Persyaratan tugas
Tuntutan tanggung jawab terhadap pekerjaan bawahan akan mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang manajer.
5. Iklim organisasi
Faktor ini dapat mempengaruhi harapan dan perilaku anggota kelompok serta gaya kepemimpinan yang dipilih manajer.
6. Perilaku dan harapan rekan
Rekan kerja manajer merupakan kelompok acuan yang penting. Semua pendapat sesama manajer sangat mempengaruhi efektivitas kerja manajer.

2.1.7 Tipe Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Mochammad Zaini Mustakim (2015:11) Tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan, yaitu:

1. Kepemimpinan Regresif
Dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintah yang kekuasaan politiknya dipengang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak.
2. Kepemimpinan konservatif – involutif
Merupakan model kepemimpinan kepala desa yang bekerja adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Desa.

3. Kepemimpinan inovatif-progresif
Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel.

Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa, legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakat.

2.1.8 Indikator Kepemimpinan

Menurut Kiswanto (2010:81), indikator kepemimpinan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kemampuan
Upaya yang dilakukan oleh pemimpin dalam menggerakkan dan mendorong karyawan dalam bekerja sesuai target yang ingin dicapai.
2. Kepribadian
Merupakan sikap tegas, berani, dan agresif yang ditunjukkan pemimpin dalam memberikan arahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan.

3. Pengalaman

Merupakan kondisi dimana pimpinan menunjukkan kinerja yang dimiliki, dengan memberikan petunjuk atau masukan terhadap pekerjaan,

4. Intelektual

Merupakan kemampuan pimpinan di dalam melakukan komunikasi terhadap karyawan terhadap tugas yang diberikan masing-masing.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif.

Menurut Widjaja, (2003:169) pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan,

atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipengang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program sifat partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang dimiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung,

pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pedamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pedamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2009:60) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun eksternalnya. Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan perubahan sosial masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat, perlu diubah ke arah sikap dan tindakan yang positif dan kreatif, dan mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak menjadi ketergantungan sehingga menjadi masyarakat yang berdaya. Penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu:

a. Pemukiman

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi yang tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah.

d. Penyokongan

Pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

2.2.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Suharto mengemukakan pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian dari kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.

Edward III, G.C. mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan yaitu: komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition) dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah diterapkan.

b. Sumber daya

Selain itu, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kebutuhan untuk profesionalisme sumber daya manusia dan aktivitas yang mereka lakukan dapat memberikan kontribusi pada suksesnya usaha dan dapat memberikan daya saing perusahaan/organisasi atas produktivitas, kualitas dan jasa pelayanan, (Robert,2001:1). Pembudayaan pendidikan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan.

c. Disposisi

Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah disposisi. disposisi atau sikap dan pelaksanaan kebijakan adalah faktor yang penting ketiga suatu kebijakan public. Hubbeis, et.al. (2008:14) mengatakan bahwa cara seseorang pemimpin dalam memberdayakan bawahannya adalah pemimpin mempercayai bawahannya untuk bisa melakukan lebih banyak karena potensi yang dimilikinya. Menurut Mortimer (2002:178) mengatakan cara mendorong orang atau bawahan adalah jangan rendahkan seseorang bawahan,jangan kritik bawahan di depan umum, beri perhatian penuh pada bawahan dan selalu terbuka pada hal-hal kecil.

d. Struktur birokrasi

Terdapat enam karakteristik birokrasi yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan publik.
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan public yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Judul dan Tahun	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Sigit Suwardianto (2015) melaksanakan penelitian ini dengan Judul “Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung kecamatan godean kabupaten sileman”	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat yang belum merata dalam segala bidang kehidupan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat	Penelitian yang dibuat oleh Sigit Suwardianto berfokus pada pengkajian tentang faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sidoagung kecamatan godean kabupaten sleman	Sama-sama membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat
2.	Nurhayati A Yasin (2016) Melaksanakan penelitian dengan judul “gaya kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa Tolinggula”	Penelitian yang ditulis Nurhayati A Yasin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Tolinggula.	Penelitian yang ditulis oleh Nurhayati A Yasin hanya berfokus kepada gaya kepemimpinan dan tidak mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat”	Sama-sama meneliti tentang satu variabel dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	Retno Ayu Tia (2021) melaksanakan penelitian dengan judul”koordinasi kepemimpinanan kepala desa dalam	Penelitian yang dilakukan Retno Ayu Tia untuk mengetahui bagaimana koordinasi tingkat pimpinan desa	Penelitian yang ditulis oleh Retno Ayu Tia berfokus pada pengkajian tentang koordinasi	Penelitian ini sama-sama menggambarkan kepemimpinan seorang kepala desa dalam pemberdayaan

	pemberdayaan masyarakat di desa Pematang Kerasaan”	dalam pemberdayaan masyarakat di desa pematang kerasaan	seorang kepala desa terhadap masyarakatnya	masyarakat
--	--	---	--	------------

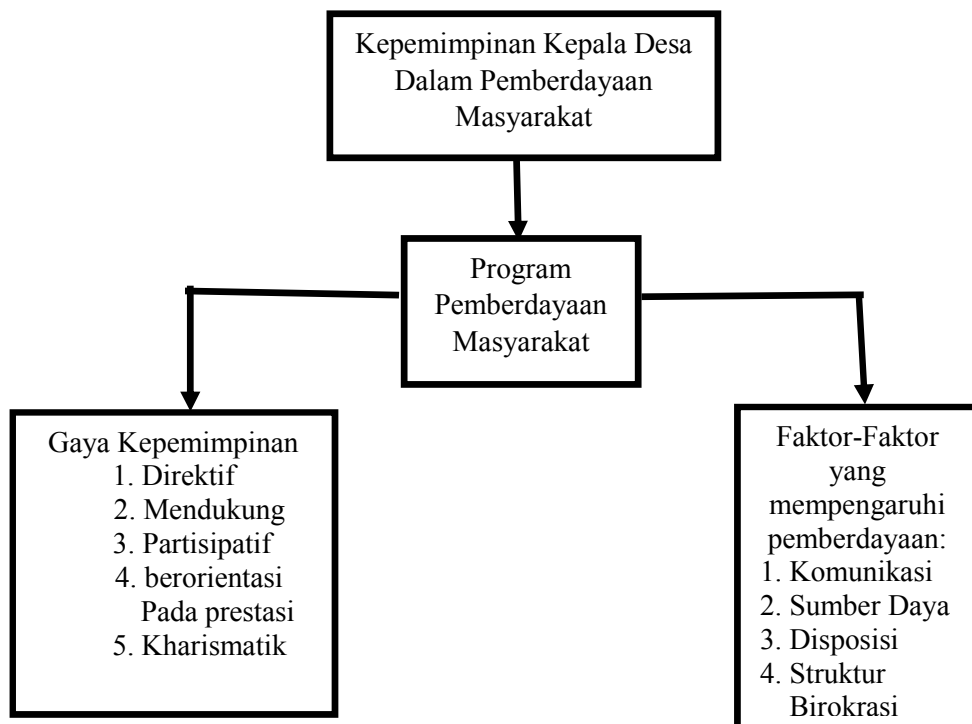
2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan dan kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kerangka konsep yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini.

Kepala desa dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan yang strategis dalam membawa masyarakat kearah tujuan pembangunan desa. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 24 yakni Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemeritah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyaarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena, dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subjek dan objek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasidan kontribusinyadalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai objek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan mamfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2 : Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, dimana data-datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya. Atau sebagaimana mestinya dengan tidak berubah simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau proses menjanging dan mendapatkan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada objeknya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana metode ini menggambarkan dan mendeskripsikan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Lumbanpea melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan suatu laporan dan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya dengan apa yang hendak diteliti. Adapun penelitian ini dilakukan yaitu di Desa Lumbanpea Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba. Penentuan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian. Waktu penelitian dari April hingga Juli 2023.

3.3 Informan Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pertanyaan-pertanyaan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti ditempat penelitian diantaranya:

- a. Informan kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi-informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lumbanpea
- b. Informan utama, merupakan yang terlibat langsung dalam peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Masyarakat Lumbanpea
- c. Informan tambahan, merupakan pendukung biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Lumbanpea

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Data Primer

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data primer, merupakan data tentang Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber langsung dari informan.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh Data Primer

a. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadap-hadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *fokus group interview*. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur yang dirancang memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Creswell John. W, 2013:267-268).

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam program Pemberdayaan Masyarakat.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh Data Sekunder.

a. Dokumentasi

Selama penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail) (Creswell John. W, 2013:267-268).

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Miles dan Huberman (2007:26) yang dikutip dari Sugiyono (2011:2460) membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus, mulai dari awal

hingga akhir penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Pada tahap penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dengan hubungan antar kategori dan sejenisnya, dan dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, memahami kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam tehnik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada